PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

LKjIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA & LITBANG) Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Wujud pertanggungjawaban tersebut di dokumentasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan ini baik itu berupa tenaga, pikiran dan upaya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini dapat terus memberikan manfaat dan kontribusi secara optimal bagi peningkatan kinerja instansi diwaktu yang akan datang.

Tanjung Selor, 05 Maret 2025
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara,

Sa tius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan Kinerja BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara secara utuh selama Tahun 2024, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (intermediate outcome), kegiatan (*immediate outcome*), dan subkegiatan (*output*).

Rumusan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Renstra, IKU, Renja, RKT, PK dan DPA, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara adalah berikut:

A. Sasaran pertama adalah: **Meningkatnya Kualitas Dokumen Rencana dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja**, Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan** dan **Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan,** maka dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   - Pelaksanaan Konsultasi Publik;
   - Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
   - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
   - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD;
   - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi;

c) Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi;
   - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
   - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;

B. Sasaran kedua adalah: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan dengan indikator kinerja Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan dan Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memperoleh input sebagai berikut:

1. Anggaran bappeda dan litbang pada tahun 2024 sebesar Rp.33.327.940.092-, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.32.685.600.092,00.- Belanja Pegawai sebesar Rp.8.871.246.062,00.- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.23.814.354.030.- dan Belanja Modal sebesar Rp. 642.340.000,00. Dengan total Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 26.450.155.371,00,- (79,36%).

2. Sumber daya aparatur sejumlah 50 orang PNS. Dari jumlah 50 orang tersebut terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 10 Pejabat Fungsional dan pelaksana sebanyak 34 orang sedangkan tenaga kontrak berjumlah 34 orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan S2 10 (Sepuluh) orang, S1 33 (tiga Puluh Tujuh) orang, D3 5 (Lima) orang dan SLTA 2 (Dua) orang.
3. Sejumlah sarana dan prasarana kantor.

   Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dikedepankan, dari analisis laporan keuangan dan kegiatan, Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

   Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya tenaga perencana yang bersertifikasi, dimana sampai akhir tahun 2024 Pejabat Perencana yang bersertifikat belum terpenuhi serta masih terbatasnya sarana prasarana perkantoran.

   Dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerjasama tim, permasalahan-permasalahan tersebut tetap dapat diatasi meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya sangat membutuhkan penyempurnaan sebagai langkah perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitasn aparatur perencana serta peningkatan jumlah personil, melalui rekrutmen pegawai baru.

   Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih belum bisa dikatakan ideal.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... ii
Ringkasan Eksekutif..... iii
Daftar isi..... x
Daftar Tabel..... xi
Daftar Gambar..... xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG..... 1
1.2. DASAR HUKUM 2
1.3. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 5
1.4. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS 8
1.5. PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS)..... 9
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 13
2.2 PERJANJIAN KINERJA 19
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 21

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 22
3.2 REALISASI ANGGARAN..... 38

BAB IV.PENUTUP

4. 1 KESIMPULAN..... 46
4. 2 RENCANA TINDAKLANJUT..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 16
Tabel 2.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 18
Tabel 2.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan 19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2024..... 23
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 26
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dengan 2024..... 28
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra..... 30
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Rata-rata Nasional..... 31
Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja 33
Tabel 3.6 Dukungan Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja..... 34
Tabel 3.7 Realisasi Fisik Dan Keuangan Bappeda Dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Dan Litbang 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia bahwa setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "*good governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara menyusun LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dalam APBD Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

yang dimuthahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan;
14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
17) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara;
18) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara, tugas pokok dari Bappeda dan Litbang adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

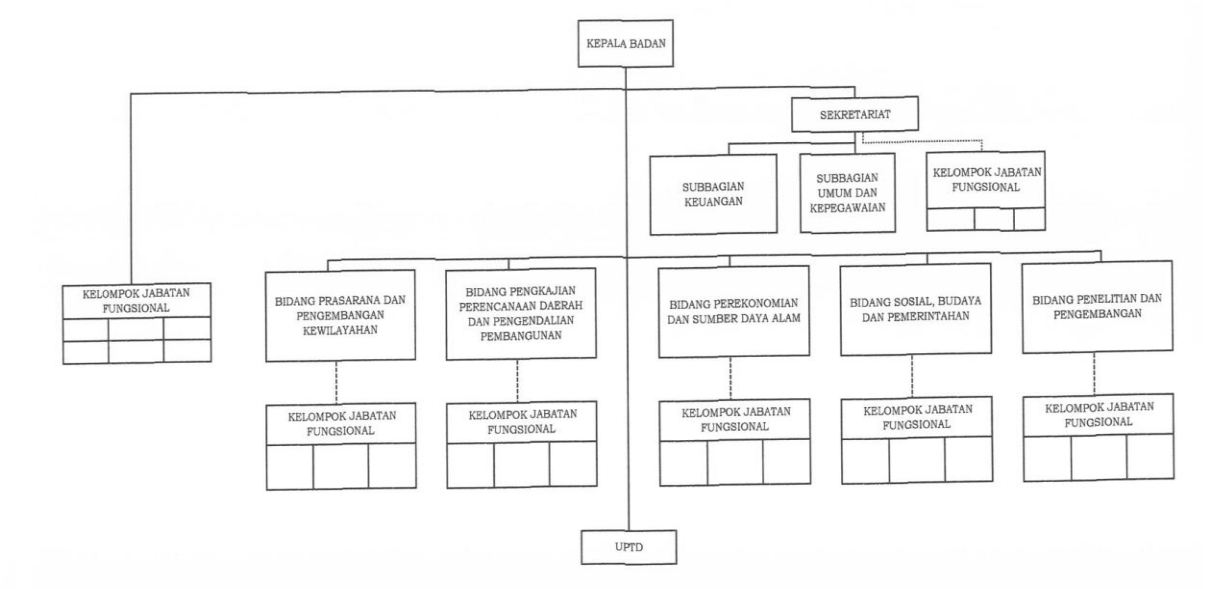
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam rangka optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah dilengkapi dengan susunan organisasi dalam rangka pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi dan integrasi, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya dan pengembilan Keputusan. Adapun susunan organisasi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekertaris, yang membawahi:
    1. Subbagian keuangan; dan
    2. Subbagian umum dan kepegawaian.
c. Kepala Bidang prasarana dan pengembangan wilayah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Kepala Bidang pengkajian perencanaan daerah dan pengendalian pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Kepala Bidang perekonomian dan sumberdaya alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kepala Bidang sosial, budaya dan pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kepala Bidang penelitian dan pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Sumber : Pergub Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi pegawai Bappeda dan Litbang berdasarkan jenjang pendidikan dalam melaksanakan layanan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Jabatan	SMA/ SMK	D III	DIV/ S1	S2	Jumlah
1.	Esselon II					-
2.	Esselon III			2	2	4
3.	Esselon IV			1		1
4.	Fungsional Teknis			8	2	10
5.	ASN Pelaksana	2	5	22	5	34
Total		2	5	33	9	**49**

Sumber : Bappeda & Litbang Prov Kaltara, data di olah

1.4. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan Perencanaan pembangunan Daerah menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Kemudian dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga Rencana pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian Undang- Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah. perangkat daerah tersebut memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi didaerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didaerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam level operasional kebijakan tersebut pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah di implementasikan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian pengembangan (Bappeda dan

Litbang) adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang perencanaan, pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan.

1.5. Permasalahan (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan hal tersebut isu strategis Tahun 2024 menjadi kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2024. Untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Sebagaimana esensi dari tugas Bappeda dan Litbang, yaitu mengharuskan seluruh *stakeholder* yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Bappeda dan Litbang dihadapkan kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, sinkronisasi data-data pembangunan, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Selain tantangan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

1. Kurang optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
   - Keselarasan perencanaan pembangunan
   - Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
   - Ketersediaan sumber daya aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan.
2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Belum dijadikan Bahan Pertimbangan Kebijakan Perencanaan Berikutnya
   - Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi
   - Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
   - Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan non formal
   - Peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Berdasarkan hal tersebut Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara merumuskan program prioritas perencanaan yang merujuk pada Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, mulai dari Indikator Kinerja Kepala Bappeda dan Litbang sampai dengan Indikator Kinerja Individu yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Utara.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis Perangkat Daerah serta permas-alahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah. Dengan point – point ;

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2. Mandat dan Peran Strategi
3. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja eselon II tahun yang bersangkutan. Dengan point – point ;

a. Rencana Strategis
b. Prioritas Daerah
c. Perjanjian Kinerja
d. Rencana Kerja dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
    1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
    2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
    3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja eselon II. Dengan point-point :

- ❖ Pengukuran Kinerja
- ❖ Analisis Capaian Kinerja
- ❖ Capaian Kinerja Lain
- ❖ Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- ❖ Perjanjian Kinerja
- ❖ Realisasi Anggaran
- ❖ Foto Penghargaan yang diraih/diperoleh perangkat daerah (Jika Ada)
- ❖ Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya

Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2021-2026 mengalami perubahan RPJMD dan Renstra berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021-2022 dan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi.

Adapun **tujuan** yang tertuang dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah

"Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah"

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan diatas maka dirumuskan sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026 sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
2) Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran berikut indikator yang ingin dicapai dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	95%	80%	85%	90%
Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	85%	90%	95%
	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	85%	90%	95%

Sumber : Perubahan Renstra 2021-2026

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Berikut Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah.
3) Meningkatkan kualitas inovasi daerah.
4) Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pengembangan inovasi daerah.

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan berlandaskan analisa dan kajian pembangunan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Bappeda Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD
		Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan
	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan inovasi daerah
	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Sumber : Perubahan Renstra 2021-2026

2.1.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, terdapat 4 Program, 16 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan yang rencanakan dan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dengan nomenklatur sebagai berikut,

Tabel 2.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
				3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				4. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
				5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
				2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
				2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				3. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2.	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
				2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah

a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan memperhatikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026, Dokumen Renja dan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Bappeda dan Litbang tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut,.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	80%
2.	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85%
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85%

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang bersumber dari Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, Renja dan Perubahan Renja 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2024 harus diidentifikasi dan dirumuskan program kegiatan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan kinerja.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang pada tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.33.327.940.092-, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 32.685.600.092,00.- Belanja Pegawai sebesar Rp.8.871.246.062,00.- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.23.814.354.030.- dan Belanja Modal sebesar Rp. 642.340.000,00.

Dukungan program yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dalam pelaksanaan kinerja adalah 4 (empat) Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.327.940.092., dengan nomenklatur program sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.17.853.104.619,-
2. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 3.545.896.522
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah dengan anggaran Rp. 5.262.295.786
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp.6.666.643.165

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang

a. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun tersebut menyajikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kinerja yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang kemudian tetapkan melalui Perjanjian kinerja Tahun 2024, dengan melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dapat disajikan capaian kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebagai berikut ;

Tabel 3.1.
Capaian IKU Bappeda dan Litbang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan** Meta Indikator: *Jumlah Program RPJMD dibagi* *Jumlah Program RPJMD dalam RKPD dikali 100*	100%	100%	100%
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan Meta Indikator: *Jumlah Program PD Mencapai target dibagi Jumlah Program RKPD*	80%	85,83%	107,29%
2	**Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan**	**Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan** Meta Indikator: *Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan dibagi Jumlah Seluruh Inovasi dikali 100*	85%	75,95%	89,35%
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah Meta Indikator: *Jumlah Hasil Kajian yang digunakan dibagi Jumlah Seluruh Hasil kajian dikali 100*	85%	100,00%	117,65%

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas disajikan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan analisa sebagai berikut:

1. Bahwa pada indicator Persentase tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan, berdasarkan hasil pengukuran antara target 100% dan realisasi kinerja (100%) menunjukan bahwa kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024 telah tercapai dengan nilai capaian 100%.
2. Pada indikator Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan pada tahun 2024 menetapkan target kinerja sebesar 80%, berdasarkan data kinerja dan pengukuran hasil kinerja, menghasilkan realisasi kinerja sebesar 85,83%, sehingga menunjukan bahwa kinerja telah berhasil dan tercapai dengan nilai capaian 107,29%.
3. Untuk sasaran Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan pada Indikator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan pada tahun 2024, berdasarkan data kinerja dan proses pengukuran kinerja didapati bahwa realisasi kinerja sebesar 75,95 %, dibandingkan dengan target sebesar 85%, sehingga menunjukan kinerja belum tercapai dengan nilai capaian kinerja sebesar 89,35%.
4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah menetapkan target kinerja sebesar 85%, berdasarkan data kinerja dan hasil pengukuran kinerja menunjukan realisasi kinerja sebesar 100%, sebagaimana data tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan kinerja telah berhasil dan tercapai dengan capaian sebesar 117,65%.
5. Berdasarkan data rata-rata target dan realisasi kinerja dari masing-masing indicator kinerja menunjukan bahwa total rata-rata realisasi kinerja sebesar 90% dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 88%, menghasilkan **capaian kinerja** sebesar **104%, dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil dan mencapai target.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dalam upaya perbaiakan berkesinambungan dalam pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	-
2	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	71,49%	78,66%	85,83%	Capaian Meningkat
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	72,22%	80,70%	75,95%	Capaian Menurun
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	50%	100,0%	100,0%	Capaian Meningkat

Sumber : data diolah

Pada tabel diatas disajikan informasi realisasi kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dengan analisa sebagai berikut:

1. Pada indikator Persentase tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan, pada tahun 2022 - 2024 realisasi kinerja sebesar 100%, hal tersebut menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang mampu mempertahankan keberhasilan atau ketercapaian kinerja.
2. Untuk indikator Persentase capaian program dalam RKPD mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 72,25%, pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 78,66% dan pada tahun tahun 2024 realisasi kinerja sebesar

85,83%, hal ini menunjukan bahwa terdapat upaya-upaya perbaiakan yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sampai pada tahun 2024 sehingga kinerja meningkat dan tercapai.

3. Pada Indikator Persentase Inovasi Daerah yang telah diimplementasikan Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 90,28%, pada tahun 2023 realisasi kinerja turun menjadi 80,70%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 75,95%, hal ini menunjukan trend menurunnya kinerja dari tahun tahun sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian dan bahan perbaiakan pada tahun selanjutnya.
4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 62,50%, meningakat pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dan pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 100%, hal tersebut menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang mampu konsisten selama tahun 2022 - 2024 mempertahankan keberhasilan atau ketercapaian kinerja.
5. Berdasarkan data rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 (73,43%), tahun 2023 **(89,84%),** dan data realisasi tahun 2024 **(90,45%)** menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

Dalam rangka memastikan bahwa organisasi berada dalam jalur yang benar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah serta perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026 sehingga dapat di identifikasi dan diketahui masalah dan hambatan, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui koreksi dan penyesuaian, serta meningkatkan strategi

dan aksi dalam optimalisasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun informasi perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut,

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 dan akhir Renstra	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	Tercapai
2	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	85,83%	90,00%	95%	Belum Tercapai
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	75,95%	95,00%	80%	Belum Tercapai
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	100,0%	95,00%	105%	Tercapai

Sumber : data diolah

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel diatas dapat informasikan analisa sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan, berdasarkan target akhir Renstra 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang kinerja telah tercapai dan organisasi sudah berada pada jalur yang benar untuk mempertahankan keberhasilan kinerja.
2. Pada indikator Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan, pada target akhir Renstra 2021-2026 ditetapkan target kinerja sebesar 90,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 85,83%, menunjukan kinerja belum tercapai, akan tetapi kinerja

sudah berada pada jalur yang tepat dan benar dalam rangka pencapaian target akhir.

3. Realisasi kinerja Indikator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 75,95%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 yaitu 95,00%, menunjukan bahwa target belum tercapai, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya korektif, strategik, dan teknis dalam rangka optimalisasi kinerja untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan.
4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, Berdasarkan target akhir Renstra 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 95,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, hal tersebut menunjukan bahwa kinerja telah tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja tahun 2025, mengingat target tahun dan target akhir Renstra 2021-2026 telah tercapai dan terlampaui.

d. Perbandingan Capaian dengan Rata-Rata Nasional

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian dengan Rata-Rata Nasional 2024

No	Indikator Kinerja Bappenas	Realisasi Kinerja 2024*	Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang	Realisasi Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93,78%	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%
2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	99,75%	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	78,66%
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis pembangunan	99,65%	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80,70%

	Nasional yang dijalankan oleh K/L			
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	99,78%	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	100,0%

**Data Realisasi Kinerja tahun 2023* *Sumber : data diolah*

Indikator kinerja pada Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional dikarenakan keempat indikator tersebut hanya digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi dan berbeda dengan indicator kinerja pada Kementerian Perencanaan Pembangnunan Nasional.

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja

" Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah"

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran I,

- Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
- dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan;
- optimalisasi instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- pemanfaatan data dan informasi;
- lingkungan Kerja yang kondusif;
- komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
- akuntabel dalam melaksanakan kegiatan;
- adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan;
- kolaborasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;

- kolaborasi stakeholder dan para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan;
- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran I,

- belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM;
- lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat;
- belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi ;
- komitmen Perangkat Daerah masih rendah terhadap pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian dan evaluasi.

Solusi dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun yang akan datang

- Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja;
- mempertahankan dan meningkatkan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan;
- mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi;
- mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana;
- mempertahankan pelaksanaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi;
- mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif;
- mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
- mempertahankan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan;
- mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam pencapaian sasaran kinerja;
- mempertahankan kolaborasi dan kerjasama antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;

- meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui forum, koordinasi dan konsultasi;
- meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perangkat Daerah.
- mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan"

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran II,

- Komitmen pimpinan dalam meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan;
- dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- lingkungan kerja yang kondusif;
- instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- pemanfaatan data dan informasi;
- komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
- akuntabel dalam melaksanakan kegiatan;
- dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan;
- adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan;
- kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran II,

- rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap inovasi daerah;
- belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM;

- belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan masyarakat;
- belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Solusi dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun yang akan datang

- Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja;
- mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi;
- mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana;
- mempertahankan dan meningkatkan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan terutama pada penyelenggaraan inovasi daerah;
- mempertahankan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi;
- mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
- mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif;
- mempertahankan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan;
- mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam dinamika pencapaian sasaran kinerja;
- mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya;
- meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat;
- melakukan penyesuian penetapan target kinerja untuk tahun selanjutnya pada indikator Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, mengingat realisasi kinerja tahun 2024 (100%) sudah melebihi target akhir Renstra Tahun 2021-2026 (95%);

- ❖ mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

f. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja. hasil analisis efisiensi anggaran Bappeda dan Litbang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4	(5	(6)
1.	**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah**	Persentase tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	90,59%	9,41%
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	107,29%	84,81%	15,19%
2	**Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan**	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	89,35%	56,88 %	Belum efisien
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	117,65%	70,42%	29,58%

Sumber : data diolah

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 indikator kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 3 indikator kinerja yang efektif dan efisien dalam penyerapan dana dan 1 indikator kinerja yang belum efisien dalam penyerapan anggarannnya.

g. Analisis Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

Adapun dukungan program dan kegiatan dalam capaian kinerja pada sasaran strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Dukungan Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2024		Program	Capaian Program
		Realisasi	Capaian (%)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
2	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	85,83%	107,29%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	75,95%	89,35%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	80, 8%
	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	100,00%	117,65%		

Sumber : data diolah

Berdasarkan data kinerja, realisasi anggaran dan tabel diatas didapatkan data dukungan program kegiatan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dengan informasi sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian 100% dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 100% dan dukungan kegiatan sebagai berikut;
   - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.036.962.230., (95,33%) dari Rp. 2.136.830.862.,
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.716.417.690., (89,55%) dari Rp. 1.916.802.280.,
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.507.281.639 (86,49%) dari Rp. 1.742.715.582.,
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.543.527.661., (96,30%) dari pagu anggaran Rp. 1.602.777.924.,

2. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian 100%, adapun dukungan kegiatan sebagai berikut :

- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 636.728.694 (65,88%) dari pagu anggaran Rp. 442.500.000.,
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 333.770.026., (65,88%) dari pagu anggaran Rp. 966.565.660.,

3. Adapun dukungan program kegiatan dalam pencapaian indicator kinerja Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan capaian sebesar 80,8%, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut;
   - Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 772.757.251., (96,21%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 803.168.165.,

4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, didukung oleh Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan capaian sebesar 80,8%, serta kontribusi kegiatan sebagai berikut;
   - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.598.872.348., (70,42%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.690.475.000.,
   - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 421.001.291.,(19,37%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.690.475.000.,

5. Selain dukungan langsung dari Program kegiatan teknis juga terdapat dukungan tidak langsung atau penunjang dari manajemen kesekretariatan dalam rangka mendorong tercapainya kinerja tahun 2024 melalui Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian program sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.882.836.541., (83,36%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.853.104.619.,

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.7

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**3.545.896.522,00**	**3.007.460.950,00**	**84,82**	**9,02**	**538.435.572,00**
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.136.830.862,00**	**2.036.962.230,00**	**95,33**	**6,11**	**99.868.632,00**
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	152.200.000,00	151.047.915,00	99,24	0,45	1.152.085,00
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	53.420.000,00	47.052.400,00	88,08	0,14	6.367.600,00
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.800.000,00	15.054.800,00	95,28	0,05	745.200,00
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	106.552.862,00	105.401.581,00	98,92	0,32	1.151.281,00
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.808.858.000,00	1.718.405.534,00	95,00	5,16	90.452.466,00
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**442.500.000,00**	**333.770.026,00**	**75,43**	**1,00**	**108.729.974,00**
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	250.000.000,00	185.516.762,00	74,21	0,56	64.483.238,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	192.500.000,00	148.253.264,00	77,01	0,44	44.246.736,00
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**966.565.660,00**	**636.728.694,00**	**65,88**	**1,91**	**329.836.966,00**
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	295.590.830,00	206.367.281,00	69,82	0,62	89.223.549,00
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	457.999.830,00	255.683.161,00	55,83	0,77	202.316.669,00
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	212.975.000,00	174.678.252,00	82,02	0,52	38.296.748,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.262.295.786,00**	**4.767.226.990,00**	**90,59**	**14,30**	**495.068.796,00**
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.916.802.280,00**	**1.716.417.690,00**	**89,55**	**5,15**	**200.384.590,00**
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.025.000,00	58.598.458,00	59,78	0,18	39.426.542,00
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	37.200.000,00	26.900.000,00	72,31	0,08	10.300.000,00
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	112.800.000,00	105.063.249,00	93,14	0,32	7.736.751,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	301.000.000,00	253.199.488,00	84,12	0,76	47.800.512,00
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.750.000,00	48.794.989,00	85,98	0,15	7.955.011,00
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13.500.000,00	11.660.000,00	86,37	0,03	1.840.000,00
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.156.000,00	122.970.976,00	90,32	0,37	13.185.024,00
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.161.371.280,00	1.089.230.530,00	93,79	3,27	72.140.750,00
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1.742.715.582,00**	**1.507.281.639,00**	**86,49**	**4,52**	**235.433.943,00**
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.387.150,00	166.520.365,00	96,60	0,50	5.866.785,00
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.028.400,00	15.968.000,00	99,62	0,05	60.400,00
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	58.198.800,00	55.334.600,00	95,08	0,17	2.864.200,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	823.322.292,00	806.749.103,00	97,99	2,42	16.573.189,00
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	167.034.950,00	160.893.938,00	96,32	0,48	6.141.012,00
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.836.810,00	19.643.000,00	99,02	0,06	193.810,00
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	76.237.095,00	74.193.949,00	97,32	0,22	2.043.146,00
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	409.670.085,00	207.978.684,00	50,77	0,62	201.691.401,00
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.602.777.924,00**	**1.543.527.661,00**	**96,30**	**4,63**	**59.250.263,00**
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,05	0,00
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.775.000,00	13.750.000,00	99,82	0,04	25.000,00
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	75.740.000,00	66.137.554,00	87,32	0,20	9.602.446,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	761.277.924,00	723.844.547,00	95,08	2,17	37.433.377,00
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.660.000,00	2.625.000,00	98,68	0,01	35.000,00
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.825.000,00	12.775.000,00	99,61	0,04	50.000,00
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	29.750.000,00	26.975.646,00	90,67	0,08	2.774.354,00
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	689.250.000,00	679.919.914,00	98,65	2,04	9.330.086,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6.666.643.165,00**	**3.792.630.890,00**	**56,89**	**11,38**	**2.874.012.275,00**
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**3.690.475.000,00**	**2.598.872.348,00**	**70,42**	**7,80**	**1.091.602.652,00**
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	3.690.475.000,00	2.598.872.348,00	70,42	7,80	1.091.602.652,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**2.173.000.000,00**	**421.001.291,00**	**19,37**	**1,26**	**1.751.998.709,00**
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1.623.000.000,00	421.001.291,00	25,94	1,26	1.201.998.709,00
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**803.168.165,00**	**772.757.251,00**	**96,21**	**2,32**	**30.410.914,00**
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	477.780.765,00	455.218.643,00	95,28	1,37	22.562.122,00
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	325.387.400,00	317.538.608,00	97,59	0,95	7.848.792,00
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.853.104.619,00**	**14.882.836.541,00**	**83,36**	**44,66**	**2.970.268.078,00**
X.XX.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.506.570.406,00**	**2.182.179.531,00**	**62,23**	**6,55**	**1.324.390.875,00**
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.777.889,00	99.438.247,00	78,44	0,30	27.339.642,00
X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.639.353,00	130.582.563,00	90,28	0,39	14.056.790,00
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.235.153.164,00	1.952.158.721,00	60,34	5,86	1.282.994.443,00
X.XX.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.074.006.062,00**	**8.015.790.975,00**	**88,34**	**24,05**	**1.058.215.087,00**
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.445.896.062,00	7.569.270.975,00	89,62	22,71	876.625.087,00
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	628.110.000,00	446.520.000,00	71,09	1,34	181.590.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**479.275.000,00**	**325.924.382,00**	**68,00**	**0,98**	**153.350.618,00**
X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.075.000,00	34.000.000,00	94,25	0,10	2.075.000,00
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.200.000,00	122.812.701,00	72,16	0,37	47.387.299,00
X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	273.000.000,00	169.111.681,00	61,95	0,51	103.888.319,00
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.428.433.283,00**	**2.124.164.904,00**	**87,47**	**6,37**	**304.268.379,00**
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.640.000,00	150.000,00	1,74	0,00	8.490.000,00
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.643.460,00	440.567.000,00	98,64	1,32	6.076.460,00
X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.497.320,00	25.761.375,00	56,62	0,08	19.735.945,00
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.690.651,00	200.327.300,00	65,96	0,60	103.363.351,00
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	340.001.852,00	288.613.500,00	84,89	0,87	51.388.352,00
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	1.620.000,00	40,91	0,00	2.340.000,00
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	830.000.000,00	720.778.079,00	86,84	2,16	109.221.921,00
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450.000.000,00	446.347.650,00	99,19	1,34	3.652.350,00
X.XX.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**245.000.000,00**	**244.729.900,00**	**99,89**	**0,73**	**270.100,00**
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	245.000.000,00	244.729.900,00	99,89	0,73	270.100,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.564.247.368,00**	**1.458.430.739,00**	**93,24**	**4,38**	**105.816.629,00**
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.800.000,00	8.000.000,00	81,63	0,02	1.800.000,00
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.027.200,00	85.791.499,00	91,24	0,26	8.235.701,00
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.460.420.168,00	1.364.639.240,00	93,44	4,09	95.780.928,00
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**555.572.500,00**	**531.616.110,00**	**95,69**	**1,60**	**23.956.390,00**
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.335.000,00	38.872.300,00	94,04	0,12	2.462.700,00
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.130.000,00	443.731.960,00	97,28	1,33	12.398.040,00
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.107.500,00	49.011.850,00	84,35	0,15	9.095.650,00
JUMLAH REALISASI S.D BULAN DESEMBER		**33.327.940.092,00**	**26.450.155.371,00**	**79,36**	**79,36**	**6.877.784.721,00**

Sumber : data diolah

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja program dan kegiatan strategis dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil.

Proses penyusunan perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Dokumen Renstra tahun 2021-2026, Dokumen Perubahan Renja tahun 2024, Laporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2024 dan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. dengan melibatkan semua unit kerja dilingkungan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun data kinerja yang dilakukan pengukuran dan evaluasi bersumber dari Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Perubahan RKPD tahun 2024, Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, Laporan Inovative Government Award Provinsi Kalimanta Utara, Laporan Lomba Inovasi Daerah, dan Hasil Penelitian dan Pengembangan (kajian) tahun 2024. Berdasarkan proses inventarisasi data, pengolahan data dan analisa dapat disajikan hasil kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1). Berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang

berhasil atau tercapai kinerjanya yaitu, 1). Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, 2). Persentase capaian program dalam RKPD; dan 3). Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah sedangkan pada indikator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan kinerja belum tercapai.

2). Dari data target dan realisasi kinerja yang tersedia pada masing-masing indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah **berhasil dan mencapai target kinerja**, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 yaitu sebesar **90,45%**, lebih tinggi dari rata-rata target kinerja tahun 2024 yaitu sebesar **88%**.

3). Rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **89,84%** dan data realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar **90,45%** menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2023.

4). Menurut data rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 yaitu **(89,84%)** dan data realisasi tahun 2024 **(90,45%)** menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2023.

5). Rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 yaitu sebesar **90,45%,** apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra 2021-2026 yaitu sebesar **95,00%,** menunjukkan bahwa kinerja belum tercapai, akan tetapi kinerja sudah berada dalam jalur yang benar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi melalui koreksi dan penyesuaian, serta meningkatkan strategi dan aksi dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan target akhir yang telah ditetapkan.

6). Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 terdapat **4 Program dan 16 kegiatan serta**

62 Sub kegiatan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja dengan **total penyerapan anggaran** sebesar **Rp. 26.450.155.371., (79,36%)** dari total **pagu anggaran sebesar Rp.33.327.940.092**.

7). Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 1,32.

8). Keberhasilan pencapaian kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja utama sasaran strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut,

a. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja;
b. dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan;
c. dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
d. optimalisasi instrumen pengendalian dan evaluasi secara berkala;
e. pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian dan evaluasi;
f. adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan;
g. akuntabel dalam melaksanakan kinerja;
h. lingkungan Kerja yang kondusif;
i. komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
j. kolaborasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
k. kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan *stakeholder* dan para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan;
l. kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

9). Belum tercapaianya kinerja indikator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan pada tahun 2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut,

a. rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap inovasi daerah;
b. belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM;
c. belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan masyarakat;
d. belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil inventarisasi data, pengolahan data dan analisa data terhadap pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang, dapat dihasilkan saran dan rekomendasi sebagai berikut ;

1). Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja;
2). mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi;
3). mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana;
4). mempertahankan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dan meningkatkan kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada indicator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan ;
5). mempertahankan pelaksanaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara berkala;
6). mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi hasil;
7). mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif;
8). mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;

9). mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan;
10). mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam pencapaian sasaran kinerja;
11). mempertahankan kolaborasi dan kerjasama antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
12). meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat ;
13). meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perangkat Daerah;
14). mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya;
15). meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat;
16). mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
17). melakukan penyesuian penetapan target kinerja untuk tahun selanjutnya pada indikator Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, mengingat realisasi kinerja tahun 2024 (100%) sudah melebihi target akhir Renstra Tahun 2021-2026 (95%).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024

1. **PERANGKAT DAERAH** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimtanan Utara**
2. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian dan pengembangan

3. **FUNGSI** :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan & statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh PD
   b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunaan dan statistik daerah
   c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi
   d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia
   e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya
   f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah
   g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi & pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan
   h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
   i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
   j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI DATA	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
S.1	Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	Mengukur tingkat Konsistensi nomenklatur Program pada Dokumen RKPD dengan nomenklatur program pada dokumen RPJMD yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	Jumlah Program RPJMD / Jumlah Program RPJMD dalam P-RKPD X 100	100	Dokumen RPJMD Dokumen P-RKPD	Bidang PPDPP Bidang PPW Bidang Sosbudpem Bidang PSDA
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	untuk melihat efektivitas program dalam pelaksanaan pembangunan melalui tingkat ketercapaian program RKPD tahun berkenaan yang dibandingkan dengan total jumlah program RKPD	Jumlah Program yang tercapai / Jumlah Program RKPD X 100	80	Laporan Evaluasi Hasil RKPD	Bidang PPDPP Bidang PPDPP Bidang PPW Bidang Sosbudpem Bidang PSDA
S.2	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	Mengukur tingkat implementasi/ penerapan inovasi yang ada di daerah, dengan total seluruh inovasi yang diusulkan pada BSKDN, dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik didaerah	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan / Jumlah Seluruh Inovasi X 100	85	1. Laporan Inovasi Daerah 2. indeks.inovasi.bskdn.kemendagri	Bidang Penellitian dan Pengembangan
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	Untuk mengukur pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang hasilnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan didaerah.	Jumlah Hasil Kajian yang digunakan / Jumlah Seluruh Hasil kajian X 100	85	Laporan Hasil Kajian	Bidang Penellitian dan Pengembangan

Plt. Kepala Badan,

BERTIUS, S.Hut.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19720206 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bertius, S.Hut.**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 25 November 2024

Pihak Kedua Gubernur Kalimantan Utara,	Pihak Pertama Plt. Kepala BAPPEDA dan LITBANG,
Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.	**BERTIUS, S.Hut.** NIP. 19720206 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%
		Persentase capaian program dalam RKPD	80%
3	Meningkatnya Fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85%
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85%

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	17.853.104.619,00	P-APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	3.545.896.522,00	P-APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	5.262.295.786,00	P-APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	6.666.643.165,00	P-APBD
	JUMLAH	**Rp**	**33.327.940.092,00**	**P-APBD**

Tanjung Selor, 25 November 2024

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Pihak Pertama
Plt. Kepala BAPPEDA dan LITBANG,

BERTIUS, S.Hut.
NIP. 19720206 199301 1 001

CASCADING BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

IKU PROVINSI			IKU OPD					ESELON 3			JFT		
SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN PROGRAM / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN KEGIATAN/ SEKSI	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.	Predikat SAKIP	BB	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100	Meningkatkan dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase konsistensi kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra PD kedalam Renja PD	100	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaa PD	Persentase Kegiatan dan sub kegiatan teknis yang mengungkit kinerja PD	100
									Persentase konsistensi sub Kegiatan pada RKPD yang dianggarkan dalam APBD		Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan	Persentase keterisiaan data perencanaan dalam SIPD	100
						Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	80	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Persentase capaian indikator program pada PD	100	Meningkatkan kualitas monitoring program pembangunan	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklajuti oleh perangkat daerah	100
					Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	70	Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pengembangan inovasi daerah	persentase inovasi daerah yang memenuhi indikator indeks inovasi	100
						Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan	5

CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN : Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR : a. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
b. Persentase capaian program dalam RKPD

NO.	INDIKATOR KINERJA	Jenis Target Kuantitatif/Kualitatif	Target	Formula/Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Tehnik Perhitungan	Kinerja	
							Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/4)
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Kuantitatif	100%	Jumlah Program RPJMD / Jumlah Program RPJMD didalam RKPD X 100	Jumlah Program RPJMD=257 Jumlah Program P-RKPD 2024=240	Jumlah Program RPJMD dibagi Jumlah Program RPJMD dalam RKPD dikali 100	100%	100%
2	Persentase capaian program dalam RKPD	Kuantitatif	80%	Jumlah Program mencapai Target / Jumlah Program RKPD X 100	Jumlah Program P-RKPD 2024= 240 Jumlah Program P-RKPD 2024 yang mencapai target = 206	Jumlah Program RKPD Mencapai target (205) dibagi Jumlah Program RKPD (240) dikali 100	85,83%	107,29%

Tanjung Selor, 05 Maret 2025
Plt. Kepala Badan,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720206 199301 1 001

CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
SASARAN : Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan
INDIKATOR : a. Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan
b. Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	Jenis Target Kuantitatif/Kualitatif	Target	Formula/Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Tehnik Perhitungan	Kinerja	
							Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/4)
1	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	Kuantitatif	85%	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan / Jumlah Seluruh Inovasi X 100	Jumlah Inovasi Implementasi = 60 Jumlah Inovasi = 79	Jumlah Inovasi Implementasi = (60) / dibagi Jumlah Inovasi (79) *100%	75,95%	89,35%
2	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	Kuantitatif	85%	Jumlah Hasil Kajian yang digunakan / Jumlah Seluruh Hasil kajian X 100	Jumlah Hasil Kajian digunakan = 8 Jumlah seluruh kajian = 8	Jumlah Hasil Kajian digunakan (8) dibagi Jumlah seluruh kajian (8)*100%	100,00%	117,65%

Tanjung Selor, 05 Maret 2025
Plt. Kepala Badan,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720206 199301 1 001

DATA DUKUNG KINERJA
"MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN RENCANA DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH"

IK. 1 : *PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD TAHUN BERKENAAN*

	PROGRAM PEMBANGUNAN PADA RPJMD TAHUN 2021-2026 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026		**PROGRAM PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG P-RKPD TAHUN 2024**	
NO	**PROGRAM RPJMD 2021-2026**	**PERANGKAT DAERAH**	**PERANGKAT DAERAH**	**PROGRAM P-RKPD 2024**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**CABDIN TARAKAN**	**CABDIN TARAKAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**CABDIN NUNUKAN**	**CABDIN NUNUKAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**CABDIN KTT-MLN**	**CABDIN KTT-MLN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT TAMAN BUDAYA**	**UPT TAMAN BUDAYA**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD TEK. INFORMASI**	**UPTD TEK. INFORMASI**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS KESEHATAN**	**DINAS KESEHATAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
22	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**RSUD JUSUF SK**	**RSUD JUSUF SK**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
26	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS PUPR & PERKIM**	**DINAS PUPR & PERKIM**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
28	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
29	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
32	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
35	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
37	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
38	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
39	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
40	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**SATPOL PP**	**SATPOL PP**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
42	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
43	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BPBD**	**BPBD**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
45	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS SOSIAL**	**DINAS SOSIAL**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
47	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
48	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
49	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
51	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu**	**UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
53	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DISNAKERTRANS**	**DISNAKERTRANS**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
55	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
56	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
57	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
58	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
59	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
60	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
61	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DPPPAP2KB**	**DPPPAP2KB**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
64	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
65	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
66	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
68	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
69	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
71	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
72	PROGRAM PEMBERDAYAAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	**UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
74	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
75	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
77	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
78	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
79	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
80	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
81	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
82	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
84	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
85	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
86	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET**	**UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
89	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DLH**	**DLH**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
91	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
92	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
93	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
94	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
95	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
96	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
97	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
98	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
99	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
101	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	**UPTD LAB. LH**	**UPTD LAB. LH**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
102	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DISDUKCAPIL**	**DISDUKCAPIL**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
104	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
105	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
107	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**DPMD**	**DPMD**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
109	PROGRAM PENATAAN DESA			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
110	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
111	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DISHUB**	**DISHUB**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
115	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD PELABUHAN TENGKAYU I**	**UPTD PELABUHAN TENGKAYU I**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
117	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD LIM HIE DJUNG NNK**	**UPTD LIM HIE DJUNG NNK**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
119	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
121	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
122	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
126	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
127	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
128	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
129	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
130	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS PEMUDA & OLAHRAGA**	**DINAS PEMUDA & OLAHRAGA**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
132	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
133	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
134	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
136	PROGRAM PEMBINAAN PERPUTAKAAN			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
137	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
138	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
139	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
141	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
142	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
144	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
145	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN**	**UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
147	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN**		
149	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
150	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU**	**UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
152	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
153	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPTD TENGKAYU II**	**UPTD TENGKAYU II**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
154	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**DINAS PARIWISATA**	**DINAS PARIWISATA**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
156	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
157	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
158	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
159	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS KEHUTANAN**	**DINAS KEHUTANAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
161	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
162	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
163	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
164	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN**	**UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
166	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
167	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT KPH KOTA TARAKAN**	**UPT KPH KOTA TARAKAN**	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
169	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
170	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT KPH NUNUKAN**	**UPT KPH NUNUKAN**	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
172	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
173	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT KPH KABUPATEN MALINAU**	**UPT KPH KABUPATEN MALINAU**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
175	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
176	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT KPH KABUPATEN KTT**	**UPT KPH KABUPATEN KTT**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
178	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
179	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DINAS ESDM**	**DINAS ESDM**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
181	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
182	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
183	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
184	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**DISPERINDAGKOP**	**DISPERINDAGKOP**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
186	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
187	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
188	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
189	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
190	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
191	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
192	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
193	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
194	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
195	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
196	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
197	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
198	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
200	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
201	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
202	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
204	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO PEREKONOMIAN**	**BIRO PEREKONOMIAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
206	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
208	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO ORGANISASI**	**BIRO ORGANISASI**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
210	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO UMUM**	**BIRO UMUM**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
213	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
214	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**	**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BIRO HUKUM**	**BIRO HUKUM**	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
216	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
217	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**SEKRETARIAT DPRD**	**SEKRETARIAT DPRD**	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
218	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
219	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BAPPEDA DAN LITBANG**	**BAPPEDA DAN LITBANG**	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
220	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
221	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
222	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
223	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BKAD**	**BKAD**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
224	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
225	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BAPENDA**	**BAPENDA**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
227	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT BAPENDA BULUNGAN**	**UPT BAPENDA BULUNGAN**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
229	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
230	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT BAPENDA TARAKAN**	**UPT BAPENDA TARAKAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
231	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT BAPENDA NUNUKAN**	**UPT BAPENDA NUNUKAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
233	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
234	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT BAPENDA MALINAU**	**UPT BAPENDA MALINAU**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
235	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
236	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**UPT BAPENDA TANA TIDUNG**	**UPT BAPENDA TANA TIDUNG**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
237	PROGRAM PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
238	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BKD**	**BKD**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
239	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	PROGRAM RPJMD 2021-2026	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM P-RKPD 2024
240	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**BPSDM**	**BPSDM**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
241	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BADAN PERBATASAN**	**BADAN PERBATASAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
243	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
244	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BADAN PENGHUBUNG**	**BADAN PENGHUBUNG**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
245	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
246	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**INSPEKTORAT**	**INSPEKTORAT**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
247	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
248	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
249	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**BADAN KESBANGPOL**	**BADAN KESBANGPOL**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
250	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
251	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
252	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
253	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
254	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
255	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
256	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
257	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
257 PROGRAM			**240 PROGRAM**	

	URAIAN	JUMLAH	TINGKAT KONSISTENSI (%)
	TOTAL PROGRAM RPJMD	**257 PROGRAM**	
	P-RKPD TAHUN 2024	**240 PROGRAM**	**107,08%**

DATA DUKUNG KINERJA
"MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN RENCANA DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH"

IK. 2 : PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DALAM RKPD TAHUN BERKENAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	
			KINERJA	PREDIKAT
1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82,77%	T
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59,94%	R
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100,00%	ST
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100,00%	ST
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100,00%	ST
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	89,55%	T
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
	CABDIN TARAKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82,77%	T
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
	CABDIN NUNUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201,02%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
	CABDIN KTT-MLN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85%	T
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	ST
	UPT TAMAN BUDAYA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
	UPTD TEK. INFORMASI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	215,37%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88,35%	T
2	**DINAS KESEHATAN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	
			KINERJA	PREDIKAT
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100,00%	ST
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	93,75%	ST
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50,00%	SR
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100,00%	ST
	RSUD JUSUF SK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
3	**DINAS PUPR & PERKIM**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	86,35%	T
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00%	SR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00%	SR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100,00%	ST
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	62,17%	R
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100,00%	ST
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	77,78%	T
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,00%	ST
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	28,35%	SR
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86,65%	T
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	66,67%	S
4	**SATPOL PP**	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111,11%	ST
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	100,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
5	**BPBD**	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	88,89%	T

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	
			KINERJA	PREDIKAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99,77%	ST
6	**DINAS SOSIAL**	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	76,00%	T
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15,00%	SR
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	71,67%	S
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	63,69%	R
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	560,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	ST
	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80%	T
7	**DISNAKERTRANS**	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100,00%	ST
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	144,89%	ST
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	101,87%	ST
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	68,60%	S
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	81,21%	T
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
8	**DPPPAP2KB**	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	118,89%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	134,60%	ST
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99,20%	ST
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100,00%	ST
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100,00%	ST

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN (%)	
			KINERJA	PREDIKAT
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	182,06%	ST
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	97,71%	ST
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	101,19%	ST
	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	71,38%	S
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	17,94%	SR
9	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	97,87%	ST
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00%	SR
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	135,69%	ST
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	201,80%	ST
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	103,77%	ST
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0,00%	SR
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00%	SR
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	218,00%	ST
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	ST
10	**DLH**	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	ST
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	64,95%	R

DATA DUKUNG
"MENINGKATNYA FUNGSI PENYELENGGARAAN KELITBANGAN"

IK.1 : PERSENTASE INOVASI DAERAH YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN LAIN YANG BERIRISAN	TAHAPAN INOVASI	ADMIN OPD
1	PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT SYARAT KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BAHAN BAKAR MINYAK PADA UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGKAYU II	Inovasi pelayanan publik	koperasi, usaha kecil, dan menengah,statistik,kelautan dan perikanan,energi dan sumber daya mineral,Perencanaan	Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
2	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Pembuatan e-Book Berbasis Book Creator Mengenai Alat Penangkapan Ikan (API) dan Pengaruhnya terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Inisiatif	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
3	Pembuatan Buku Panduan Sandar Speedboat Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
4	INFORMASI WILAYAH PESISIR DI KALIMANTAN UTARA (POTENSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DESA PESISIR KALIMANTAN UTARA)	Inovasi pelayanan publik	penanaman modal,statistik,kelautan dan perikanan,pariwisata,Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan,Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
5	Peningkatan Pemahaman Pembudidaya Ikan Tentang Tata Cara Pencegahan Hama Dan Penyakit Ikan Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi pelayanan publik	lingkungan hidup,kelautan dan perikanan	Inisiatif	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
6	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG AKTIFITAS DESTRUCTIVE FISHING (PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN) DAN DAMPAKNYA MELALUI MEDIA INFORMASI DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika,kelautan dan perikanan,Penelitian dan Pengembangan	Uji Coba	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
7	e-LOBSTER (ELEKTRONIK LOGBOOK PASAR TRADISIONAL PERIKANAN DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	koperasi, usaha kecil, dan menengah,kelautan dan perikanan	Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
8	E-Kontrak	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Pengadaan Barang Jasa (iga2021.biro.pengadaan)
9	Pesan Si Bu Intan Di Desa dan Kelurahan (Pemetaan Penguasaan Tanah Berbasis Buku Induk Pertanahan) Di Desa dan Kelurahan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman,pertanahan,perhubungan	Inisiatif	Biro Pemerintahan dan OTDA (iga2020.pemerintahan)
10	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Himbauan Terkait Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	UPTD KPH Nunukan (iga2023.kphnunukan)
11	PERADI ADPIM (Pelayanan Terbaik Dari Hati Biro Administrasi Pimpinan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Administrasi Pimpinan (iga2021.biro.adpim)
12	Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (e-SPPD)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Umum dan Perlengkapan (iga2020.umum)
13	LAYANAN PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Inovasi pelayanan publik		Uji Coba	Dinas Perhubungan (iga2020.perhubungan.kaltara)
14	SIJOSKU (SISTEM INFORMASI KESEJATERAAN SOSIAL)	Inovasi pelayanan publik	sosial,Perencanaan	Uji Coba	Dinas Sosial (iga2020.sosial)
15	Khusus Layanan Informasi Pengaduan Ketenagakerjaan (HARAPAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan,pekerjaan umum dan penataan ruang,tenaga kerja	Penerapan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (iga2020.disnakertrans)
16	TENGKAYU I SIAP (Sistem Integrasi Area Perparkiran)	Inovasi pelayanan publik		Uji Coba	(iga2023.tengkayu)
17	Digitalisasi Laporan Sosialisasi, Patroli, Pengamanan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) serta Data Polisi Kehutanan UPTD KPH Malinau Berbasis Website	Inovasi pelayanan publik		Uji Coba	UPTDKPHmalinau (iga2023.kphmalinau)
18	SIMPELKAJILA (Sistem Informasi Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (iga2020.pendidikankebudayaan)
19	SIKANGURU (Sistem Informasi Kepegawaian Guru)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (iga2020.pendidikankebudayaan)
20	SIAP (Sistem Informasi dan Aplikasi Pengendalian)	Inovasi pelayanan publik		Uji Coba	Badan Penghubung (iga2020.banhub)

21	SDGs KU (Sustainable Development Goals Kalimantan Utara)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	kesehatan,pekerjaan umum dan penataan ruang,ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,sosial,pengendalian penduduk dan keluarga berencana,komunikasi dan informatika,koperasi, usaha kecil, dan menengah,kebudayaan,kelautan dan perikanan,pariwisata,perindustrian,transmigrasi,Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	iga2020.provinsi.kalimantan.utara (iga2020.provinsi.kalimantan.utara)
22	PROLANTERAKU (PROGRAM LAYANAN DOKTER TERBANG KALIMANTAN UTARA)	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Dinas Kesehatan (iga2020.kesehatan)
23	ADINDAKU (ALAT ANGKUT PENGENDALI INFLASI KALIMANTAN UTARA)	Inovasi pelayanan publik	pangan,perdagangan	Penerapan	Youlce Libba TA (iga2020.disperindagkop.kaltara)
24	SIRAGAMUDAKU (SISTEM INFORMASI OLAHRAGA DAN PEMUDA TERINTEGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA)	Inovasi pelayanan publik	kepemudaan dan olah raga	Penerapan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sukmara Aldo Wiratama, S.Pd (iga2020.pemudaolahraga)
25	E-BANG (Elektronik Administrasi Pembangunan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Administrasi Pembangunan - Panji Tiara Kusuma, S.Kom & Vendy Rian Yudha Manggala, S.E (iga2020.pembangunan)
26	Sistem Informasi Honorarium	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Inisiatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah (iga2020.bkad)
27	Sistem Informasi Administrasi Peminjaman (SIAP)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Badan Keuangan dan Aset Daerah (iga2020.bkad)
28	Tata Kelola Lingkungan Hidup Kaltara Melalui Regulasi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,sosial,pertanahan, lingkungan hidup,pemberdayaan masyarakat dan Desa,kelautan dan perikanan,pertanian,kehutanan,energi dan sumber daya mineral,perindustrian	Uji Coba	Dinas Lingkungan Hidup (iga2020.dlh)
29	PENA KAYAN (PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN)	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Pelabuhan Liem Hie Jung (iga2023.liem.hiedjung)
30	GOWES (Going Zero Waste)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Penerapan	UPTD. KPH Tarakan - Asdar (iga2021.KPH.Tarakan)
31	BOMKAL (Booking Online Mess Banhub Kaltara)	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inisiatif	Badan Penghubung (iga2020.banhub)
32	D'BES LAH (Dukcapil Bejalan Ke Sekolah)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerapan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (iga2020.kependudukan.pencatatansipil)
33	SAMUDRA DKP (Sistem Manajemen Komunikasi Data dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
34	PAMANBEN DI SLTA PRO KALTARA (Pembelajaran Aman Bencana di SLTA Provinsi Kalimantan Utara)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Penerapan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (iga2020.penanggulangan.bencana)
35	SIDARA KU (Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	statistik	Penerapan	Dinas KISP (iga2020.dkisp)
36	Kolaborasi Penanganan Konflik Tenurial di Wilayah UPTD KPH Nunukan	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	UPTD KPH Nunukan (iga2023.kphnunukan)
37	SI IVAN PELARI UPTD PPA (sistem inventarisasi digital pelaporan internal) UPTD PPA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Inisiatif	Dinas P3APPKB (iga2020.dp3appkb)
38	Pengelolaan Strategi Daerah Rawan Kecelakaan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perhubungan	Penerapan	Dinas Perhubungan (iga2020.perhubungan.kaltara)

39	SIGAP PELAUT (SINERGITAS PENERAPAN STRATEGI PREVENTIF, PERSUASIF, DAN REPRESIF DALAM PENCEGAHAN DESTRUCTIVE FISHING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kelautan dan perikanan	Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
40	CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA (CUAN DINSOSKU	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Uji Coba	Dinas Sosial (iga2020.sosial)
41	SIAP SIGAPKU (SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN INFLASI DAN HARGA TERPADU KALIMANTAN UTARA)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perindustrian	Penerapan	Youlce Libba TA (iga2020.disperindagkop.kaltara)
42	Si Pelayan Pintar Si Kaltara Bisa (Fasilitasi Pelayanan Pindah Datang Luar Domisili Kaltara Berbasis Implementasi Stelsel Aktif)	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (iga2020.kependudukan.pencatatansipil)
43	KLINIK KINERJA TERPADU (KLIK AJA TU)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	kesehatan,pekerjaan umum dan penataan ruang,perumahan rakyat dan kawasan permukiman,ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,sosial,Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	Biro Pemerintahan dan OTDA (iga2020.pemerintahan)
44	SANJUNG (SAMSAT BERKUNJUNG)	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Eko (Eko UPT BAPENDA BULUNGAN)
45	SIP KOPERKU (SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN KOPERASI DAN UMKM KALIMANTAN UTARA)	Inovasi pelayanan publik	perdagangan	Penerapan	Youlce Libba TA (iga2020.disperindagkop.kaltara)
46	Akselerasi Program Pendampingan Kinerja di Provinsi Kalimantan Utara (siP dampinK KU)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Organisasi (iga2020.organisasi)
47	SipLaPM (Sistem Informasi Pengolahan Data Penanaman Modal)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	penanaman modal,statistik	Penerapan	DPMPTSP (iga2020.dpmptsp)
48	SATE PADAT (SAMSAT GOES TO RT, PAD MENINGKAT)	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	Eka (igabapenda.malinau)
49	ADMIN SMART (Aplikasi Manajemen Administrasi Perkantoran Elektronik)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	Puput Islamitha L, S.I.Kom (iga2022.Litbang4)
50	SIMPONI DESAKU (Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data dan Pelatihan Terintegrasi Desa Kalimantan Utara)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Perencanaan,Pendidikan dan Pelatihan	Penerapan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Ibu Rahima (iga2020.pemberdayaan.masyarakat.desa)
51	SMIDA (Sistem Manajemen Inovasi Daerah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Penelitian dan Pengembangan,Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inisiatif	Puput Islamitha L, S.I.Kom (iga2022.Litbang4)
52	Digital Ecosystems Beasiswa Kaltara Unggul (DAEBAK)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	kepemudaan dan olah raga,Pendidikan dan Pelatihan	Penerapan	Biro Kesejahteraan Masyarakat (iga2020.kesejahteraan)
53	Pusat Informasi Terpadu Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi pelayanan publik		Inisiatif	Dinas ESDM (iga2020.esdm)
54	SAPPA-PERADI	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Badan Keuangan dan Aset Daerah (iga2020.bkad)
55	Inovasi Layanan Bersol (Berbagi dan Sosialiasi)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan	Tiara (uptdbapenda.tarakan)
56	BAPAK BERSATU (Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepat Waktu)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan	Tiara (uptdbapenda.tarakan)
57	P2KB (Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan	Tiara (uptdbapenda.tarakan)
58	Strategi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Baku Sawah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pertanian	Inisiatif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (iga2020.dpkp)
59	RUJAK KTMDU (BERBURU PAJAK KTMDU)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan	Tiara (uptdbapenda.tarakan)
60	HUNTING KENDARAAN	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan	Tiara (uptdbapenda.tarakan)
61	AKSELERASI POLA ASIMILASI GURU PENGGERAK DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI TERHADAP GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (iga2020.pendidikankebudayaan)

62	INTERNALISASI BerAKHLAK (Instrumen Pelaksanaan Evaluasi BerAKHLAK)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah		Penerapan	Biro Organisasi (iga2020.organisasi)
63	SOA (SUBSIDI ONGKOS ANGKUT)	Inovasi pelayanan publik	perdagangan	Penerapan	Youlce Libba TA (iga2020.disperindagkop.kaltara)
64	Strategi Membuka Lahan Tanpa Membakar	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Penerapan	Taufan (iga.kphbulungan2024)
65	SiBaper (Sistem Informasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inisiatif	Sekretariat Dewan (iga2020.sekwan)
66	Kaltara Di Hati, Kaltara Rumah Kita, Masyarakat Menyapa	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan	Biro Umum dan Perlengkapan (iga2020.umum)
67	Rumah Singgah Gratis RSUD dr H Jusuf SK	Inovasi pelayanan publik	sosial	Penerapan	YOGA (iga.2024rsud)
68	Komunitas Orang Tua Anak dengan Kondisi Khusus (KOTAK) di RSUD Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi pelayanan publik	pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Penerapan	YOGA (iga.2024rsud)
69	Pengembangan Kompetensi ASN Kalimantan Utara Unggul Melalui Corporate University (CORPU-KU)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan	Inisiatif	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (iga2020.pengembangan.sdm)
70	Abang Tarbat (Akselerasi Pengembangan Pelayanan Antar Obat)	Inovasi pelayanan publik	sosial	Penerapan	YOGA (iga.2024rsud)
71	Anjungan Pasien Mandiri (APM) : Inovasi Modern dalam Layanan Kesehatan di RSUD dr.H Jusuf SK	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Penerapan	YOGA (iga.2024rsud)
72	Transformasi Layanan Kesehatan Inovasi Pendaftaran Online Terintegrasi SIMRS, di RSUD dr H Jusuf SK	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Penerapan	YOGA (iga.2024rsud)
73	SIPELANDUKILAT SMART (Sistem Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan dengan Pendekatan Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Based)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Penerapan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (iga2020.kependudukan.pencatatansipil)
74	SOBAT-PS - Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Inovasi pelayanan publik	kehutanan	Penerapan	Dinas Kehutanan (iga2020.kehutanan)
75	Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu di Luar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Produk Energi Terbarukan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kehutanan	Penerapan	Dinas Kehutanan (iga2020.kehutanan)
76	TAPE (Perencanaan dan Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis di Kalimantan Utara)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pertanian,kehutanan	Penerapan	Puput Islamitha L, S.I.Kom (iga2022.Litbang4)
77	Layanan Informasi Geografis Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Berbasis WebGIS	Inovasi pelayanan publik		Penerapan	Dinas Kehutanan (iga2020.kehutanan)
78	Pengelolaan Tambak Tradisional Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PETA TAMBAK)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Penerapan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Andriani, S.Kom (iga2020.kelautanperikanan)
79	SISTEM KEHADIRAN ASN KALTARA (SIKARA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Penerapan	Badan Kepegawaian Daerah (iga2020.kepegawaian.daerah)

DATA DUKUNG
"MENINGKATNYA FUNGSI PENYELENGGARAAN KELITBANGAN"

IK.2 : PERSENTASE HASIL KAJIAN (PENELITIAN) YANG DIGUNAKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAERAH

No	Daftar Riset Daerah	Keterangan	Rumusan Rekomendasi	Link Rekomendasi
1.	Penyusunan Buku Sejarah Provinsi Kalimantan Utara	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2024
2.	Potensi dan Sinergi CSR Untuk Percepata Pembangunan Daerah	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2025
3.	Penyusunan Profil Desa di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2026
4.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Batu Benau	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2027
5.	Survei Pemetaan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2028
6.	Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Provinsi Kalimantan Utara	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2029
7.	Survey Pengukuran Kualitas Layanan Publik	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2030
8	Peningkatan Produksi Udang Windu (Implementasi Demplot (Demonstration Plot) Tambak Budidaya Provinsi Kalimantan Utara	Selesai	ada	bit.ly/kajianlitbang2031

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	7	8	9	10
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**	**3.545.896.522,00**	**3.007.460.950,00**	**84,82**	**9,02**	**538.435.572,00**
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.136.830.862,00**	**2.036.962.230,00**	**95,33**	**6,11**	**99.868.632,00**
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	152.200.000,00	151.047.915,00	99,24	0,45	1.152.085,00
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	53.420.000,00	47.052.400,00	88,08	0,14	6.367.600,00
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas	15.800.000,00	15.054.800,00	95,28	0,05	745.200,00
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	106.552.862,00	105.401.581,00	98,92	0,32	1.151.281,00
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	1.808.858.000,00	1.718.405.534,00	95,00	5,16	90.452.466,00
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**	**442.500.000,00**	**333.770.026,00**	**75,43**	**1,00**	**108.729.974,00**
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	250.000.000,00	185.516.762,00	74,21	0,56	64.483.238,00
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	192.500.000,00	148.253.264,00	77,01	0,44	44.246.736,00
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**	**966.565.660,00**	**636.728.694,00**	**65,88**	**1,91**	**329.836.966,00**
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	295.590.830,00	206.367.281,00	69,82	0,62	89.223.549,00
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	457.999.830,00	255.683.161,00	55,83	0,77	202.316.669,00
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	212.975.000,00	174.678.252,00	82,02	0,52	38.296.748,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN**	**5.262.295.786,00**	**4.767.226.990,00**	**90,59**	**14,30**	**495.068.796,00**
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan**	**1.916.802.280,00**	**1.716.417.690,00**	**89,55**	**5,15**	**200.384.590,00**
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	98.025.000,00	58.598.458,00	59,78	0,18	39.426.542,00
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	37.200.000,00	26.900.000,00	72,31	0,08	10.300.000,00
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	112.800.000,00	105.063.249,00	93,14	0,32	7.736.751,00
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	301.000.000,00	253.199.488,00	84,12	0,76	47.800.512,00
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	56.750.000,00	48.794.989,00	85,98	0,15	7.955.011,00
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	13.500.000,00	11.660.000,00	86,37	0,03	1.840.000,00
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	136.156.000,00	122.970.976,00	90,32	0,37	13.185.024,00
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	1.161.371.280,00	1.089.230.530,00	93,79	3,27	72.140.750,00
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber**	**1.742.715.582,00**	**1.507.281.639,00**	**86,49**	**4,52**	**235.433.943,00**
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	172.387.150,00	166.520.365,00	96,60	0,50	5.866.785,00
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	16.028.400,00	15.968.000,00	99,62	0,05	60.400,00
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	58.198.800,00	55.334.600,00	95,08	0,17	2.864.200,00
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	823.322.292,00	806.749.103,00	97,99	2,42	16.573.189,00
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	167.034.950,00	160.893.938,00	96,32	0,48	6.141.012,00
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	19.836.810,00	19.643.000,00	99,02	0,06	193.810,00
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	76.237.095,00	74.193.949,00	97,32	0,22	2.043.146,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	7	8	9	10
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	409.670.085,00	207.978.684,00	50,77	0,62	201.691.401,00
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.602.777.924,00**	**1.543.527.661,00**	**96,30**	**4,63**	**59.250.263,00**
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,05	0,00
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	13.775.000,00	13.750.000,00	99,82	0,04	25.000,00
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	75.740.000,00	66.137.554,00	87,32	0,20	9.602.446,00
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	761.277.924,00	723.844.547,00	95,08	2,17	37.433.377,00
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.660.000,00	2.625.000,00	98,68	0,01	35.000,00
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	12.825.000,00	12.775.000,00	99,61	0,04	50.000,00
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	29.750.000,00	26.975.646,00	90,67	0,08	2.774.354,00
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	689.250.000,00	679.919.914,00	98,65	2,04	9.330.086,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6.666.643.165,00**	**3.792.630.890,00**	**56,89**	**11,38**	**2.874.012.275,00**
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan**	**3.690.475.000,00**	**2.598.872.348,00**	**70,42**	**7,80**	**1.091.602.652,00**
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan	3.690.475.000,00	2.598.872.348,00	70,42	7,80	1.091.602.652,00
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan**	**2.173.000.000,00**	**421.001.291,00**	**19,37**	**1,26**	**1.751.998.709,00**
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1.623.000.000,00	421.001.291,00	25,94	1,26	1.201.998.709,00
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**803.168.165,00**	**772.757.251,00**	**96,21**	**2,32**	**30.410.914,00**
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	477.780.765,00	455.218.643,00	95,28	1,37	22.562.122,00
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	325.387.400,00	317.538.608,00	97,59	0,95	7.848.792,00
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**17.853.104.619,00**	**14.882.836.541,00**	**83,36**	**44,66**	**2.970.268.078,00**
X.XX.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**3.506.570.406,00**	**2.182.179.531,00**	**62,23**	**6,55**	**1.324.390.875,00**
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.777.889,00	99.438.247,00	78,44	0,30	27.339.642,00
X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	144.639.353,00	130.582.563,00	90,28	0,39	14.056.790,00
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.235.153.164,00	1.952.158.721,00	60,34	5,86	1.282.994.443,00
X.XX.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.074.006.062,00**	**8.015.790.975,00**	**88,34**	**24,05**	**1.058.215.087,00**
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.445.896.062,00	7.569.270.975,00	89,62	22,71	876.625.087,00
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	628.110.000,00	446.520.000,00	71,09	1,34	181.590.000,00
X.XX.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**479.275.000,00**	**325.924.382,00**	**68,00**	**0,98**	**153.350.618,00**
X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.075.000,00	34.000.000,00	94,25	0,10	2.075.000,00
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	170.200.000,00	122.812.701,00	72,16	0,37	47.387.299,00
X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	273.000.000,00	169.111.681,00	61,95	0,51	103.888.319,00
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.428.433.283,00**	**2.124.164.904,00**	**87,47**	**6,37**	**304.268.379,00**
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8.640.000,00	150.000,00	1,74	0,00	8.490.000,00
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.643.460,00	440.567.000,00	98,64	1,32	6.076.460,00
X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.497.320,00	25.761.375,00	56,62	0,08	19.735.945,00
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.690.651,00	200.327.300,00	65,96	0,60	103.363.351,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	%	TTB (%)	
1	2	3	7	8	9	10
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	340.001.852,00	288.613.500,00	84,89	0,87	51.388.352,00
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	1.620.000,00	40,91	0,00	2.340.000,00
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	830.000.000,00	720.778.079,00	86,84	2,16	109.221.921,00
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	450.000.000,00	446.347.650,00	99,19	1,34	3.652.350,00
X.XX.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**245.000.000,00**	**244.729.900,00**	**99,89**	**0,73**	**270.100,00**
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	245.000.000,00	244.729.900,00	99,89	0,73	270.100,00
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.564.247.368,00**	**1.458.430.739,00**	**93,24**	**4,38**	**105.816.629,00**
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.800.000,00	8.000.000,00	81,63	0,02	1.800.000,00
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.027.200,00	85.791.499,00	91,24	0,26	8.235.701,00
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.460.420.168,00	1.364.639.240,00	93,44	4,09	95.780.928,00
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**555.572.500,00**	**531.616.110,00**	**95,69**	**1,60**	**23.956.390,00**
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	41.335.000,00	38.872.300,00	94,04	0,12	2.462.700,00
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	456.130.000,00	443.731.960,00	97,28	1,33	12.398.040,00
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.107.500,00	49.011.850,00	84,35	0,15	9.095.650,00
JUMLAH REALISASI S.D BULAN DESEMBER		**33.327.940.092,00**	**26.450.155.371,00**	**79,36**	**79,36**	**6.877.784.721,00**

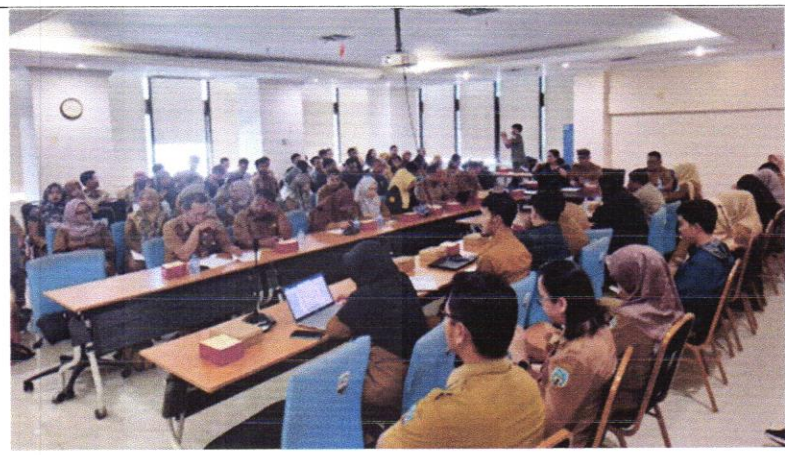
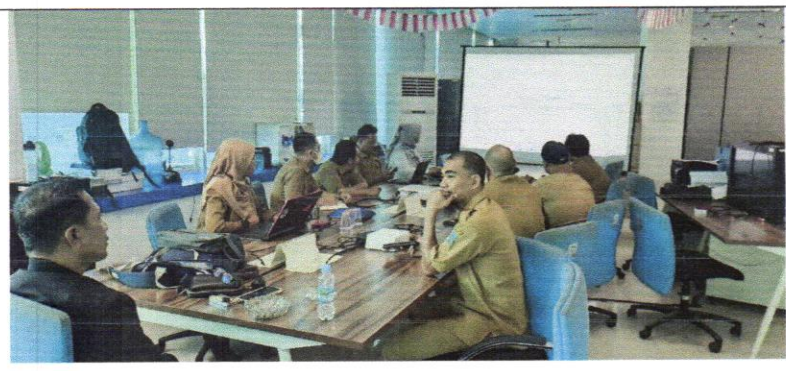
Plt. Kepala Badan,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001

DOKUMENTASI

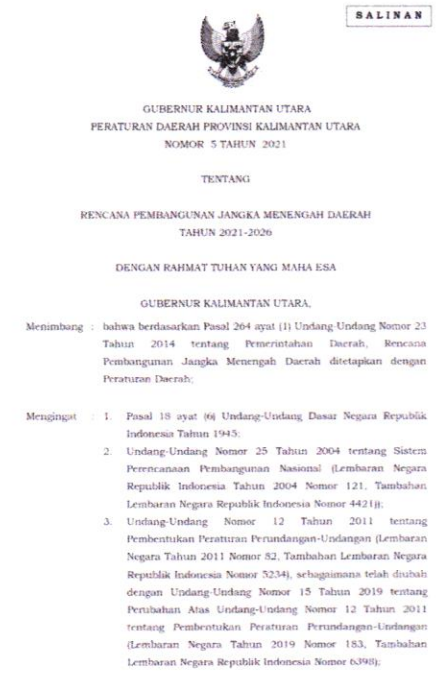
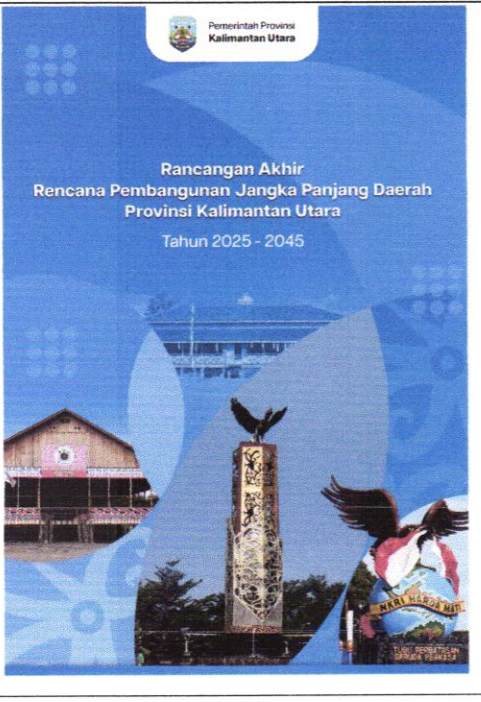
KETERANGAN	DOKUMENTASI
Kegiatan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2025	
Pelaksanaan Kegiatan Forum Lintas PD RKPD Tahun 2025	
Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025	

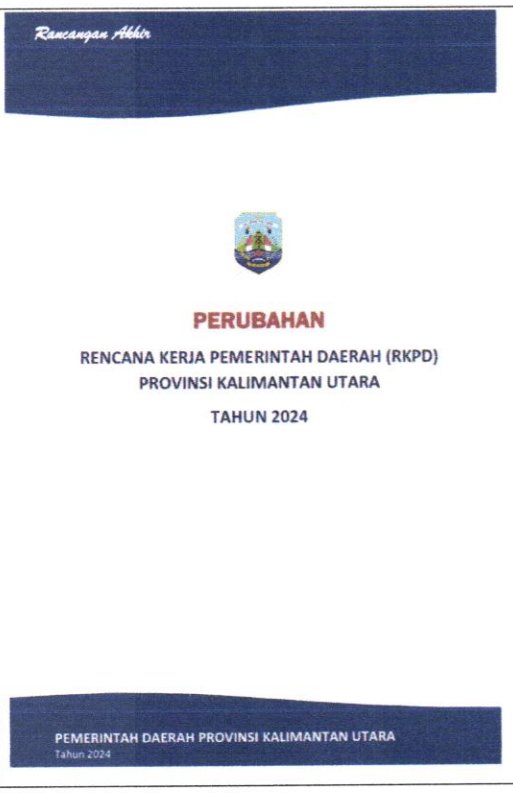
Evaluasi penyusunan Metadata Satu Data Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	
Pelaksanaan Asistensi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
Pelaksanaan Asistensi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	

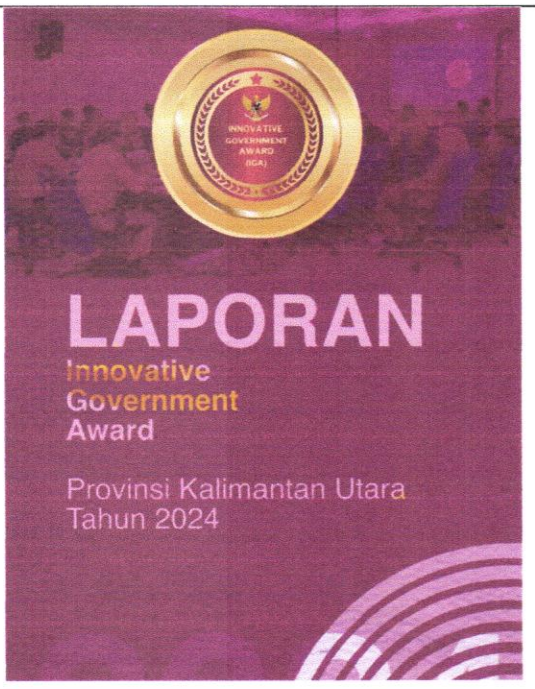
KETERANGAN	DOKUMENTASI
Bimbingan Teknis Evaluasi Renja Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Evaluasi Renja PD	
Rapat penyusunan Isu Strategis Permasalahan Utama Penanganan Stunting	

Pelaksanaan Penyelarasan Perubahan RKPD Tahun 2024	
Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah	
Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah	

Pelaksanaan Kajian - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark Batu Benau	
Pelaksanaan Kajian Potensi dan Sinergi CSR Untuk Percepata Pembangunan Daerah	
Pelaksanaan Kajian Penyusunan Buku Sejarah Provinsi Kalimantan Utara	

URAIAN	REGULASI	DOKUMENTASI
RPJMD TAHUN 2021-2026	PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021	 SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
RPJPD TAHUN 2025-2045	PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2024	 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2045

RKPD TAHUN 2025	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2024	
PERUBAHAN RKPD 2024	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2024	

Laporan IGA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024	
Laporan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024	